

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dengan menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuannya di masing-masing daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Otonomi daerah di negara Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, dan lain-lain (Pratama, 2018).

Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang

tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan fungsi yang sangat penting yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan untuk pengembangan suatu daerahnya yang dituangkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96).

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk kemajuan suatu daerah terutama masyarakatnya. Hal ini yang menjadikan pemerintah daerah ingin memperoleh pendapatan yang optimal, guna meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pihak pemerintah daerah harus mempunyai kinerja yang baik. Meningkatnya pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut akan menimbulkan dampak yang positif bagi daerah tersebut, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut yang harus dimiliki pemerintah daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan asli daerah yang lebih besar. Dengan demikian, pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah (Pratama dan Sudarmanto, 2018).

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. Adapun daerah yang dimaksud adalah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Daerah otonom itu sendiri terbagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, pajak juga digolongkan menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota (Pratama, 2018).

Salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak parkir. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah terutama dari pajak parkir antara lain dengan menetapkan Pergub No. 24 Tahun 2014 tentang pajak parkir dan retribusi Provinsi Jawa Tengah.

Dari jumlah nilai rata-rata pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 ada beberapa Kabupaten yang memiliki nilai rata-rata yang cukup besar yaitu dengan jumlah Rp. 200-400 miliar tetapi juga terdapat beberapa Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki nilai rata-rata pendapatan asli daerah di bawah Rp. 200 miliar (BPK Jateng 2014-2018). Kabupaten dengan pendapatan di atas Rp. 200 miliar adalah kabupaten Magelang, Pati, dan Pekalongan. Sedangkan kabupaten dengan pendapatan asli daerah di bawah Rp. 200 miliar adalah kabupaten Kudus dan Kota Pekalongan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak parkir. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang mengatakan bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Lebih lanjut Mufidah (2017) mengatakan dengan semakin bertambahnya penyediaan tempat parkir baik yang dimiliki badan atau pribadi sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pendaftaran dan pembayaran pajak sudah cukup maksimal. Sedangkan Wulandari (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sumber lain penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir. Dewi (2013: 8) menjelaskan retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah . yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang berdasar pada peraturan gubernur (Pergub) No. 24 Tahun 2014 tentang pajak parkir dan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah.

Seperti kita ketahui bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang mampu menggali potensi daerahnya sendiri. Salah satu potensi yang dimiliki adalah pendapatan retribusi parkir. Setiap tahun jumlah kendaraan di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan yang menyebabkan jumlah parkir juga meningkat. Berikut data pertumbuhan kendaraan bermotor di Jawa Tengah tahun 2015 – 2018 :

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018

Tahun	Kendaraan Roda 2 dan 3	Kendaraan Roda 4 dan Lebih
2015	8.538.184 Unit	1.166.678 Unit
2016	13.230.564 Unit	1.565.832 Unit
2017	14.117.213 Unit	1.715.394 Unit
2018	17.778.456 Unit	1.987.542 Unit

Sumber : BPPD Jawa Tengah 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah baik roda dua atau lebih mengalami peningkatan tiap tahun. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PAD di Jawa Tengah dari segi retribusi parkir. Pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut data target dan realisasi PAD Jawa Tengah tahun 2015 – 2018 :

Tabel 1.2 PAD Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018

Tahun	Target PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)
2015	12.000.000.000.000	10.904.825.812.504
2016	12.700.000.000.000	11.541029.720.310
2017	11.900.000.000.000	12.547.513.389.400
2018	12.900.000.000.000	13.712.496.724.127

Sumber :  
BPPD Jawa  
Tengah 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi PAD Jawa Tengah dari tahun 2015 – 2018 mengalami kenaikan. Akan tetapi jika dilihat dari target pada tahun 2015 dan 2016 realisasi PAD Jawa Tengah mengalami penurunan. Tidak tercapainya target tersebut menurut wakil gubernur Jawa Tengah disebabkan adanya penurunan daya beli kendaraan bermotor sebesar 30.000 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 realisasi PAD melebihi target. Menurut gubernur Jawa Tengah peningkatan PAD tersebut disebabkan kinerja BUMD yang lebih baik sehingga dividen yang disetorkan meningkatkan PAD (Huda, 2016).

Untuk itu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini pungutan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas pokok pemerintah daerah adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang perpajakan.

Retribusi parkir juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2010) mengatakan bahwa retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan hasil penelitian Furwanto (2013) mengatakan bahwa retribusi parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel dimana dalam penelitian ini meneliti tentang pengaruh Pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada penelitian sebelumnya meneliti tentang Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Alasan penelitian ini dilakukan adalah adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu Mufidah (2017) mengatakan bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena dengan bertambahnya penyediaan tempat parkir baik yang dimiliki badan atau pribadi sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam pendaftaran dan pembayaran pajak sudah cukup maksimal (Mufidah, 2017). Sedangkan Wulandari (2016) mengatakan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi. Disamping kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir (subjek parkir), juga dibutuhkan kesadaran dari para pengelola retribusi khususnya juru pungut lapangan terutama pemahaman mereka terkait kebijakan parkir itu sendiri. Karena boleh di katakan bahwa petugas parkir (jukir) merupakan ujung tombak dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir (Sopbaba, 2012). Hal ini lah yang menyebabkan retribusi parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota dan kabupaten provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai obyek penelitian karena Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia juga dengan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sebagai mana terlihat pada tabel 1.1.

Berdasarkan variasi hasil penelitian sebelumnya yang saling bertolak belakang dan tren penerimaan pajak parkir maupun retribusi yang naik turun setiap tahunnya serta realisasi PAD yang juga naik turun dari target yang ditetapkan, maka peneliti tertarik untuk mengulas

lebih jauh mengenai pungutan pajak parkir dan retribusi parkir, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015 – 2018”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah retribusi parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah pajak parkir dan retribusi parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan agar tidak meluasnya permasalahan yang ada.

Pembatasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sasaran penelitian adalah kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mempublikasikan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lengkap mulai periode tahun 2015 – 2018.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji pengaruh retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

3. Untuk menguji pengaruh pajak parkir dan retribusi parkir secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur bidang pajak daerah, retribusi, dan PAD serta salah satu bahan referensi untuk penelitian sejenis berikutnya, dan memperkaya wawasan bagi pembacanya.

2. Bagi Kantor Pajak

Bagi kantor pajak khususnya Badan Pengelola Penerimaan Daerah (BPPD), penelitian ini dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi wajib pajak

Dapat meningkatkan kewajiban dan kemauan dalam membayar pajak.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia (2015), skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI**

Bab ini berisi uraian tentang kajian pustaka dan teori, kerangka pikir, dan perumusan hipotesis.

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan variabel, teknik pengumpulan data, dan rancangan analisis data.

### **BAB IV        DATA DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang data induk penelitian, statistik deskriptif, analisis data (analisis pengujian hipotesis), dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V        SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Bungin. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Depok, Rajagrafindo Pustaka.
- Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.
- Dewi, Sheila Ratna. 2013. **Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang**. *Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Tidak Diterbitkan.
- Furwanto, Frengky. 2013. *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Juliansyah, Elvi. 2012. **Analisis Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang**. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 4 Nomor 1 Hal. 55-64.
- Makhsun, Ali. 2010. *Pelatihan Analisis Statistik Dengan SPSS*. Fakultas Ekonomi. UNY
- Mamesa, DJ. 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Ofset: Yogyakarta.
- Mufidah, Asma. 2017. **Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola**

**Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang).** *e – Jurnal Riset Manajemen*. Fakultas Ekonomi Unisma.

- Pratama, Ridho. 2018. ***Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017***. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information System (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(2), 103-114.
- Samudra, Aziz dan Azhari. 2015. ***Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah***. Jakarta, Rajawawali Pers.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. ***Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sopbaba, Semdi J. E. Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto. 2012. **Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD**. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN.2088-7469 Vol. 1, No. 2.
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Sunarto. 2005. ***Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik***. Yogyakarta: Amus.
- Sugiyono. 2007. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D***. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D***. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. ***Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D***. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D***. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. 2012. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D***. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Murlan. 2010. ***Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo***. Skripsi. Fisip UPN Veteran Jawa Timur.
- Wulandari, Phaureula Artha. 2016. ***Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin***. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie, Jakarta.